



Badan Pendapatan Daerah
Kabupaten Tangjung Jabung Barat

**RANCANGAN AKHIR
RENCANA KERJA 2023
BADAN PENDAPATAN DAERAH
PERUBAHAN**

KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadiran Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan hidayahNya, sehingga Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat dapat menyelesaikan penyusunan Perubahan Rencana Kerja Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2023.

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, penyusunan Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah berpedoman pada Perubahan RKPD dan hasil pengendalian pelaksanaan Renja Perangkat Daerah sampai dengan Triwulan II Tahun berkenaan.

Ucapan terima kasih kepada semua pihak yang telah berpartisipasi dalam penyusunan Perubahan Rencana Kerja Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2023. Perubahan Rencana Kerja ini masih banyak kekurangan, maka masukan yang bersifat membangun sangat diharapkan guna meningkatkan kinerja Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat. Semoga Perubahan Rencana Kerja ini dapat menjadi acuan peningkatan kinerja Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat.

Kuala Tungkal, 9 Agustus 2023

KERALA BAPENDA
PEMERINTAH KABUPATEN
BADAN PENDAPATAN DAERAH
(BAPENDA)
SUGLANTO, SE
Pembina
NIP. 19670317 199002 1 001
TANJUNG JABUNG BARAT

DAFTAR ISI

Kata Pengantar.....	i
Daftar Isi.....	ii
BAB I PENDAHULUAN	
1.1. Latar Belakang.....	1
1.2. Landasan Hukum.....	2
1.3. Maksud dan Tujuan.....	5
1.4. Sistematika Penulisan.....	6
BAB II EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH SAMPAI DENGAN TRIWULAN II	
2.1 Analisis Gambaran Pelayanan Perangkat Daerah.....	7
2.2 Analisis Hasil Pengendalian Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah sampai dengan Triwulan II tahun berkenaan.....	8
2.3 Isu – Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah.....	15
BAB III RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH	17
BAB IV PENUTUP.....	24

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Berdasarkan pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana pembangunan jangka Panjang Daerah, Rencana pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, dan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah, maka dilakukan penyesuaian Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah Tahun 2021-2026 dan sesuai hal tersebut Badan Pendapatan Daerah melakukan penyusunan Rencana Strategis Perubahan Tahun 2021-2026.

Rencana Kerja Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan perangkat daerah untuk periode 1 (satu) tahun, yang memuat program dan kegiatan yang akan dilaksanakan dalam kurun waktu satu tahun berjalan yang diperlukan untuk mencapai tujuan dan sasaran Perangkat Daerah.

Penyusunan Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah berpedoman pada Rancangan Perubahan RKPD dan hasil pengendalian pelaksanaan Renja Perangkat Daerah sampai dengan Triwulan II Tahun berkenaan. Penyusunan Rancangan Perubahan Renja Perangkat Daerah terdiri atas perumusan rancangan Perubahan Renja Perangkat Daerah mencakup analisis gambar pelayanan Perangkat Daerah, analisis hasil pengendalian pelaksanaan Renja Perangkat Daerah sampai dengan Triwulan II Tahun berkenaan, penentuan isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi perangkat daerah.

Keterkaitan Renja Perangkat Daerah dengan dokumen RKPD dan Renstra Perangkat Daerah merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan karena didalam Renja Perangkat Daerah memuat program-program sebagai penjabaran Renstra OPD dan RKPD, bertujuan untuk keselarasan dan kesesuaian antara program, kegiatan, lokasi kegiatan, kelompok sasaran, serta prakiraan maju yang disusun dalam rancangan awal Renja Perangkat Daerah, dengan adanya Renja Perangkat Daerah akan dapat lebih menjamin konsistensi perencanaan dan juga sebagai pedoman pelaksanaan program pembangunan secara berkesinambungan dan sinergi dengan program-program K/L dan Provinsi. Renja Perangkat Daerah menjadi pedoman dalam menyusun RKA Perangkat Daerah dalam proses penyusunan RAPBD.

Atas dasar hal tersebut Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat kedepan dapat menjalankan tugas-tugas pokok dalam rangka peningkatan pelayanan kepada masyarakat. Harapan tersebut akan menjadi komitmen kami yang dapat dituangkan dalam suatu perencanaan yang dapat dijadikan acuan dalam penyelenggaraan dan pertanggungjawaban Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat berupa “Perubahan Rencana Kerja Tahun 2023”.

1. 2. Landasan Hukum

Landasan hukum yang dijadikan pijakan dalam perumusan dan penyusunan Rencana Kerja Tahunan Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat antara lain :

1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten di Provinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25); sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Sarolangun Bangko dan Daerah Tingkat II Tanjung Jabung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 50 Tambahan Lembaran Negara Nomor 2755);

2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 164, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5887);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur, Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 288);

8. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah.
9. Peraturan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Nomor 11 Tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2011 Nomor 11) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Nomor 1 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2019 Nomor 1);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Nomor 12 Tahun 2013 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2013-2033 (Lembaran Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 13 Nomor 12);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2016 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Nomor 3) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Nomor 6 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2018 Nomor 6);
12. Peraturan Bupati Tanjung Jabung Barat Nomor 29 Tahun 2018 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Badan Pendapatan Daerah;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Nomor 4 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2021 Nomor 4);

14. Peraturan Bupati Tanjung Jabung Barat Nomor 24 Tahun 2021 tentang Penetapan Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2021-2026.

1.3. MAKSUD DAN TUJUAN

MAKSUD

Penyusunan Perubahan Rencana Kerja Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2023 berpedoman pada Rancangan Perubahan RKPD dan hasil pengendalian pelaksanaan Renja Perangkat Daerah sampai dengan Triwulan II Tahun berkenaan, dimaksud sebagai Dokumen Perencanaan Program Kegiatan yang memuat sasaran yang akan dicapai dalam tahun yang bersangkutan. Indikator kinerja sasaran dan target masing-masing indikator sasaran program yang direncanakan.

TUJUAN

Tujuan disusunnya Rencana Kerja Badan Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat tahun 2023 adalah untuk:

- Menjabarkan Visi, Misi, dan Program Bupati dan Wakil Bupati kedalam Bentuk Kebijakan dan Program Kegiatan Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat yang lebih rinci, terarah, terukur dan dapat dilaksanakan.
- Sebagai Instrumen untuk mempermudah dalam mengukur Kinerja dan mengevaluasi kinerja Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat dalam kurun waktu tertentu.
- Meningkatkan Efisiensi dan efektifitas Pemanfaatan Sumber-sumber Potensi Daerah. Terutama berkaitan dengan Peningkatan Pendapatan Asli Daerah.
- Menjelaskan tugas – tugas pokok dalam rangka Peningkatan Pelayanan Kepada Masyarakat.

1.4. Sistematika Penulisan

Perubahan Rencana Kerja Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2023 disusun dengan sistematika penulisan sebagai berikut :

- BAB I PENDAHULUAN
 - 1.1 Latar Belakang
 - 1.2 Landasan Hukum
 - 1.3 Maksud dan Tujuan
 - 1.4 Sistematika Penulisan

- BAB II EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH SAMPAI DENGAN TRIWULAN II TAHUN BERKENAAN
 - 2.1 Analisis Gambaran Pelayanan Perangkat Daerah
 - 2.2 Analisis Hasil Pengendalian Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah sampai dengan Triwulan II Tahun berkenaan
 - 2.3 Isu – Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah

- BAB III RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

- BAB IV PENUTUP

BAB II

EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH SAMPAI DENGAN TRIWULAN II TAHUN BERKENAAN

2.1. Analisis Gambaran Pelayanan Perangkat Daerah

Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat mempunyai tugas melaksanakan fungsi penunjang urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah di bidang pendapatan.

Gambaran Pelayanan Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat dapat dilihat pada tabel analisis gambaran pelayanan Perangkat Daerah, sebagai berikut :

TABEL 2.1
GAMBARAN PELAYANAN BADAN PENDAPATAN DAERAH
KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT

No	Indikator Kinerja	Satuan	IKK	Target Renstra Perangkat Daerah			Realisasi Capaian			Proyeksi Tahun 2023 (thn n+1)	Catatan Analisis		
				Tahun 2020 (thn n-2)	Tahun 2021 (thn n-1)	Tahun 2022 (thn n)	Tahun 2020 (thn n-2)	Tahun 2021 (thn n-1)	Tahun 2022 (thn n)				
1	Persentase Pendapatan Asli Daerah terhadap Pendapatan Daerah	%		5.3	7.98	8.06	8.12	8.12	(3.51)	9.77	11,40	8.12	Persentase Pendapatan Asli Daerah terhadap Pendapatan Daerah Tahun 2022 dari target 8.06% terealisasi 11.40%
2	Indeks Kepuasan Masyarakat			77	78.24	79	80	80	78.24	78.88	83.73	80	Capaian Nilai IKM terhadap Pelayanan Pajak Daerah pada Tahun 2022 dari target 79 terealisasi 83.73 dengan capaian kinerja 105,99%

2.2. Analisis hasil pengendalian pelaksanaan Rencana Kerja Perangkat Daerah sampai dengan Tahapan II tahun berikutnya

TABEL 2.2
REKAPITULASI EVALUASI PELAKSANAAN RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH SAMPAI DENGAN TAHAPAN II

NAMA SKPD : BADAN PENDAPATAN DAERAH KABUPATEN TANJUNGPINANG BARAT

No	Bazran	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome/hasil) (output)	Target Rencana Perangkat Daerah pada Tahun 2023 (Abit Periode Perencanaan Perangkat Daerah)		Realisasi Kinerja Perangkat Daerah sampai dengan Rencana Perangkat Daerah Tahun Laku (2022)		Target Kinerja dan capaian Rencana Perangkat Daerah tahun berjalan (2023) yang diwujudkan		Realisasi Kinerja Poin Trendin				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Rencana Perangkat Daerah tahun Pelaksanaan Rencana Perangkat Daerah tahun 2023)		Tingkat Capaian Kinerja dan realisasi anggaran rencana Perangkat Daerah tahun 2023 (%)		Unit Perangkat Daerah yang bertanggung jawab		
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	I	II	III	IV	K	Rp		K	Rp
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
		KEUANGAN			100,706,646,000	21,813,534,488	10,913,615,846	3,052,234,321	1,474,420,384	3,052,234,321	4,626,054,715	26,340,189,213	26,14%							
	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik dan Akuntabilitas Kinerja		Indeks Kepuasan Masyarakat Nilai ASP	83,00	81,73	80,00	80,00	80,00	80,00	80,00	80,00	80,00	80,00	80,00	80,00	80,00	80,00	80,00	80,00	
		Program Rangsang Usaha Persejahteraan Daerah Kabupaten/Kota	Perencanaan, Pelaksanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	100%	17,825,645,857	8,944,353,774	8,944,353,774	2,600,612,621	992,256,484	2,600,612,621	3,592,769,115	21,118,414,972	44,00%							
		Perencanaan, Pelaksanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan, Pelaksanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	38 Dokumen	19,336,730	198,729,900	198,729,900	19,900,000	22,165,900	19,900,000	41,765,900	233,182,690	47,37%	16,00%						
		Perencanaan, Pelaksanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	32 Dokumen	128,510,000	78,069,900	78,069,900	12,200,000	14,115,900	12,200,000	26,315,900	154,825,900	50,00%	21,90%						
		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Rencana Realisasi SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Rencana Realisasi SKPD	72 Laporan	353,200,000	30,060,000	30,060,000	7,400,000	8,050,000	7,400,000	15,450,000	78,276,750	41,67%	9,17%						
		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Keuangan Perangkat Daerah	6 Dokumen	44,448,000,000	7,347,008,774	7,347,008,774	2,003,118,758	716,771,009	2,003,118,758	2,719,889,768	16,556,881,977	33,33%	39,00%						
		Perencanaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menikmati Gaji dan Tunjangan ASN	339 Orang/Bulan	41,000,000,000	12,386,705,709	12,386,705,709	1,918,848,758	629,161,009	1,918,848,758	2,548,028,768	14,934,735,477	44,54%	36,40%						

No	Subsidi	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Output/Outcome) (IndUK)	Target Rencana Pelaksanaan Daerah pada Tahun 2023 (Misi Periode Rencana Perangkat Daerah)	Realisasi Capaian Kinerja Rencana Perangkat Daerah sampai dengan Rencana Pelaksanaan Perangkat Daerah Tahun Lulus (2022)	Target Kinerja dan Anggaran Rencana Perangkat Daerah tahun berjalan (2023) yang diwajibkan diwajibkan	Realisasi Kinerja Pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Rencana Perangkat Daerah tahun berjalan (2023)	Target Capaian Kinerja dan realisasi anggaran rencana Perangkat Daerah sd tahun 2023 (%)	Uraian Peringkat dan/atau yang bertanggung jawab	
							I	II	III	IV				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14 = 13/8 x 100%	15
		Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian/Identifikasi Pelaksanaan Tugas ASN	Rp 2.205.000.000 6 Dokumen	Rp 450.286.500 2 Dokumen	Rp 330.520.000 1 Dokumen	Rp 81.440.000 Dokumen	Rp 78.120.000 Dokumen	Rp 0 Dokumen	Rp 150.560.000 Dokumen	Rp 009.846.500 2 Dokumen	Rp 33.33% 27.66%		
		Koordinasi dan Pelaksanaan Administrasi SRPD	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Munitas SRPD	Rp 360.000.000 10 Dokumen	Rp 0	Rp 27.190.000 12 Laporan	Rp 6.150.000 3 Laporan	Rp 5.150.000 3 Laporan	Rp 0	Rp 12.300.000 6 Laporan	Rp 12.300.000 6 Laporan	Rp 8.33% 1.41%		
		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Belanja/Tranparansi/Semesta n SRPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Belanja/Tranparansi/Semesta n SRPD	Jumlah Laporan Keuangan Belanja/Tranparansi/Semesta n SRPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Belanja/Tranparansi/Semesta n SRPD	Rp 675.000.000 72 Laporan	Rp 0	Rp 44.150.000 12 Laporan	Rp 10.650.000 3 Laporan	Rp 10.650.000 3 Laporan	Rp 0	Rp 21.300.000 6 Laporan	Rp 21.300.000 6 Laporan	Rp 8.33% 6.16%		
		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Rp 414.000.000 72 Laporan	Rp 0	Rp 44.150.000 12 Laporan	Rp 10.650.000 3 Laporan	Rp 10.650.000 3 Laporan	Rp 0	Rp 21.300.000 6 Laporan	Rp 21.300.000 6 Laporan	Rp 8.33% 5.14%		
		Pembinaan Barang Milik Daerah pada SRPD	Jumlah Laporan Pembinaan Barang Milik Daerah pada SRPD	Rp 1.590.000.000 6 Dokumen	Rp 172.900.000 2 Dokumen	Rp 87.400.000 1 Dokumen	Rp 0	Rp 81.060.000 Dokumen	Rp 81.060.000 2 Paket	Rp 81.060.000 6 Dokumen	Rp 252.960.000 2 Dokumen	Rp 33.33% 18.87%		
		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Kepegawaian Perangkat Daerah	Rp 920.000.000 10 Paket	Rp 154.900.000 2 Paket	Rp 82.400.000 2 Paket	Rp 0	Rp 81.060.000 2 Paket	Rp 81.060.000 2 Paket	Rp 81.060.000 2 Paket	Rp 235.980.000 4 Paket	Rp 46.00% 25.85%		
		Pengadaan dan Pelaksanaan Bakti Sosial Masyarakat Karangtaruna	Jumlah Laporan Bakti Sosial Masyarakat Karangtaruna	Rp 410.000.000 50 Orang	Rp 15.000.000 4 Orang	Rp 5.000.000 8 Orang	Rp 0	Rp 0	Rp 0	Rp 0	Rp 0	Rp 0.00%		
		Bimbingan Teknis Implementasi Perubahan Perundang-undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Perubahan Perundang-undangan	Rp 200.000.000 48 Orang	Rp 15.000.000 4 Orang	Rp 5.000.000 8 Orang	Rp 0	Rp 0	Rp 0	Rp 0	Rp 18.000.000 4 Orang	Rp 8.33% 6.82%		
		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Rp 7.865.600.000 72 Laporan	Rp 1.671.803.613 24 Laporan	Rp 544.444.800 12 Laporan	Rp 134.894.938 3 Laporan	Rp 222.437.588 3 Laporan	Rp 0	Rp 357.332.516 6 Laporan	Rp 2.028.136.129 30 Laporan	Rp 41.87% 25.80%		

No	Sistem	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Output (subst)	Target Perolehan Peringkat Daerah pada Tahun 2021 (AHR Paralel Rencana Peringkat Daerah)		Pembayaran Kinerja Perolehan Peringkat Daerah sampai dengan Peringkat Daerah Tahun Lalu (2022)		Target Kinerja dan anggaran Renc. Peringkat Daerah tahun berjalan (2022) yang diwujudkan		Realisasi Kinerja Pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Perolehan Peringkat Daerah tahun berjalan (2022) (AHR Paralel Rencana Perolehan Peringkat Daerah Tahun 2022)		Target Capaian Kinerja dan realisasi anggaran rencana Peringkat Daerah s.d Peringkat Daerah s.d tahun 2023 (%)		Jumlah Pegawai yang bertanggung jawab		
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
		Penyediaan Koneksi Jaringan Listrik/Peningkatan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komitmen realisasi Listrik/Peningkatan Bangunan Kantor yang Disediakan	6 Paket	405,000,000	2 Paket	75,948,950	1 Paket	7,233,000	1 Paket	1,960,000	1 Paket	1,960,000	1 Paket	3,984,000	2 Paket	79,932,950	33.33%	19.74%	15
		Penyediaan Perlatan dan Peningkatan Kantor	Jumlah Paket Perlatan dan Peningkatan Kantor yang Disediakan	30 Paket	1,675,000,000	2 Paket	389,354,000	1 Paket	162,184,000	1 Paket	40,837,000	1 Paket	40,837,000	1 Paket	79,666,000	2 Paket	468,400,000	6.67%	27.67%	
		Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	12 Paket	263,000,000	4 Paket	53,300,000	2 Paket	25,000,000	2 Paket	3,800,000	2 Paket	3,800,000	2 Paket	7,730,000	4 Paket	61,030,000	33.33%	23.21%	
		Penyediaan Barang Cetak dan Pengadaan dan Pengadaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Pengadaan yang Disediakan	18 Paket	1,175,000,000	6 Paket	267,081,250	3 Paket	43,131,800	3 Paket	2,684,700	3 Paket	2,684,700	3 Paket	4,486,700	6 Paket	271,577,950	33.33%	23.11%	
		Penyediaan Bahan Baku dan Peningkatan Peningkatan Anggaran	Jumlah Dokumen Bahan Baku dan Peningkatan Anggaran yang Disediakan	72 Dokumen	62,500,000	24 Dokumen	12,960,000	12 Dokumen	7,920,000	0	2,320,000	6 Dokumen	2,320,000	6 Dokumen	2,320,000	30 Dokumen	15,280,000	41.67%	24.46%	
		Peningkatan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	72 Laporan	4,285,000,000	24 Laporan	873,158,413	12 Laporan	298,875,200	3 Laporan	172,909,680	3 Laporan	172,909,680	6 Laporan	258,735,816	30 Laporan	1,132,885,229	41.67%	26.44%	
		Pengadaan Barang Milik Daerah Pelelangan Urusan Pemertintah Daerah	Persentase Pengadaan Barang Milik Daerah Pelelangan Urusan Pemertintah Daerah	100%	5,905,000,000	33.33%	896,680,000	16.67%	6,800,000	0	0	0	0	0	0	33.33%	905,680,000	33.33%	16.88%	
		Pengadaan Kebutuhan Peningkatan Dana atau Kebutuhan Dana Jabatan yang Disediakan	Jumlah Unit Kebutuhan Peningkatan Dana atau Kebutuhan Dana Jabatan yang Disediakan	1 Unit	500,000,000												0	0.00%	0.00%	
		Pengadaan Kebutuhan Dana Operasional atau Lapangan yang Disediakan	Jumlah Unit Kebutuhan Dana Operasional atau Lapangan yang Disediakan	10 Unit	1,720,000,000		440,000,000									1 Unit	440,000,000	10.00%	26.16%	
		Program Maba	Jumlah Maba yang Disediakan	100 Unit	600,000,000				6,800,000							0	0	0.00%	0.00%	

No	Sasaran	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (efektifitas/kuantitas) (output)	Target Kinerja dan Pengukuran Kinerja pada Tahun 2023 (Misi Periode Rencana Perangkat Daerah)		Pembiasan Capaian Kinerja Rencana Perangkat Daerah sesuai dengan Rencana Perangkat Daerah Tahun Lalu (2022)		Target Kinerja dan Pengukuran Kinerja pada tahun berjalan (2023) yang diwujudkan		Realisasi Kinerja pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Rencana Perangkat Daerah di tahun 2023 (Misi) Tahun Pelaksanaan Rencana Perangkat Daerah Tahun 2023		Tingkat Capaian Kinerja dan realisasi anggaran rencana Perangkat Daerah di tahun 2023 (%)		Unit Pengukuran dan/atau yang bertanggung jawab	
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	I	II	III	IV	K	Rp	K	Rp		K
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		Pengadaan Pasokan dan Meubel Lainnya	Jumlah Unit Pasokan dan Meubel Lainnya yang Disiapkan	245 Unit	2,325,000,000	49 Unit	545,790,000								49 Unit	545,790,000	20.00%	23.67%	
		Pengadaan Alat Tulis Lainnya	Jumlah Unit Alat Tulis Lainnya yang Didistribusikan	5 Unit	500,000,000										0	0	0.00%		
		Penyediaan Jasa Perawatan dan Pemeliharaan Daerah	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Perawatan dan Pemeliharaan Daerah	72 Laporan	2,271,196,000	24 Laporan	484,406,631	64,240,041	0	0	130,437,254	30 Laporan	614,846,285	41.67%	30 Laporan	20,389,800	41.67%	27.07%	
		Penyediaan Jasa Suci Bersih	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Suci Bersih	72 Laporan	101,100,000	24 Laporan	18,367,700	1,100,000	0	0	2,031,900	30 Laporan	20,389,800	41.67%	30 Laporan	20,389,800	41.67%	20.16%	
		Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Didistribusikan	72 Laporan	1,645,096,000	24 Laporan	353,745,031	47,678,041			93,487,356	30 Laporan	447,232,387	41.67%	30 Laporan	147,214,298	41.67%	27.19%	
		Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Umum Kantor yang Didistribusikan	72 Laporan	525,000,000	24 Laporan	112,296,300	17,462,000			34,917,998	30 Laporan	147,214,298	41.67%	30 Laporan	147,214,298	41.67%	28.04%	
		Pembelajaran Barang Milik Daerah Peningkatan Unsur Pemeliharaan Daerah	Pembelajaran Pemeliharaan Barang Milik Daerah Peningkatan Unsur Pemeliharaan Daerah	100%	5,218,560,880	33.33%	1,172,514,254	197,486,241	0	0	240,983,677	38.89%	1,413,487,831	38.16%	38.89%	1,413,487,831	38.16%	27.19%	
		Penyediaan Jasa Penelitian, Bina Pemeliharaan dan Pajuk Kemandirian Perangkat Daerah atau Kemandirian Dinas Jabatan	Jumlah Kemandirian Perangkat Daerah atau Kemandirian Dinas Jabatan yang Dihasilkan dan dibayarkan Pajuknya	6 Unit	622,000,000	2 Unit	94,205,240	7,374,261			12,876,697	2 Unit	107,081,507	33.33%	2 Unit	107,081,507	33.33%	17.22%	
		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Pajuk dan Pembinaan Kemandirian Dinas Operasional atau Layanan	Jumlah Kemandirian Dinas Operasional atau Layanan yang Dihasilkan dan dibayarkan Pajuk dan Pertezeranya	262 Unit	1,618,000,000	82 Unit	381,910,661	140,532,430			188,967,430	101 Unit	561,818,094	31.35%	101 Unit	561,818,094	31.35%	34.30%	

No	Sasaran	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Output/Magnitude Output)	Target Realisasi Program Daerah pada Tahun 2023 (sisa Periode Rencana Perangkat Daerah)		Realisasi Capaian Kinerja Rencana Perangkat Daerah Tahun Lalu (2022)		Target Kinerja dan capaian Rencana Perangkat Daerah tahun berjalan (2023) yang diwajibkan		Realisasi Kinerja Pada Trimester				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Rencana Perangkat Daerah tahun 2023 (Misi Tahun Pelaksanaan Rencana Perangkat Daerah Tahun 2023)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Rencana Perangkat Daerah tahun 2023 (Misi Tahun Pelaksanaan Rencana Perangkat Daerah Tahun 2023)		Tingkat Capaian Kinerja dan realisasi anggaran rencana Perangkat Daerah 45 tahun 2023 (%)		Unit Perangkat Daerah yang bertanggung jawab	
				Q1	Q2	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
		Persediaan Saluran dan Pemasangan Pergerakan Pajak Daerah	Jumlah Saluran dan Pemasangan Pergerakan Pajak Daerah	7 Unit	2.400.000.000	3 Unit	89.269.000	1 Unit	36.210.000	1 Unit	2.175.000	1 Unit	28.400.000	1 Unit	30.665.000	4 Unit	119.804.000	4 Unit	57,14%	0,02%	15
		Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pencatatan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah, Subjek Pajak dan Wajib Pajak Daerah	66 Laporan	2.410.000.000	22 Laporan	570.772.250	11 Laporan	182.101.000	3 Laporan	43.475.000	3 Laporan	51.425.000	3 Laporan	94.900.000	28 Laporan	660.672.250	28 Laporan	42,42%	27,62%	
		Pengalihan, Pemeliharaan dan Pelayanan Basis Data Pajak Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengalihan, Pemeliharaan dan Pelayanan Basis Data Pajak Daerah	29 Laporan	3.200.000.000	9 Laporan	323.271.750	4 Laporan	173.750.000	1 Laporan	19.650.000	1 Laporan	31.670.000	1 Laporan	51.520.000	9 Laporan	374.791.750	9 Laporan	36,00%	11,71%	
		Pembelian Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2) serta Eka Perseroan Hak Atas Tanah dan Bangunan (EPTB)	Jumlah Denda Pajak yang Diawalkan N.O.P nya	15000 Objek Pajak	3.665.000.000	6491 Objek Pajak	1.045.190.050	2500 Objek Pajak	70.635.000	643 Objek Pajak	10.650.000	1248 Objek Pajak	13.624.100	2091 Objek Pajak	24.274.100	8582 Objek Pajak	1.069.424.150	8582 Objek Pajak	57,21%	28,02%	
		Penerapan Wajib Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Kelengkapan Pajak Daerah	18 Dokumen	3.595.000.000	6 Dokumen	345.105.511	3 Dokumen	244.954.672	1 Dokumen	144.003.900	1 Dokumen	62.805.060	2 Dokumen	206.808.900	8 Dokumen	551.914.411	8 Dokumen	44,44%	13,35%	
		Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah	Jumlah Layanan dan Konsultasi Pajak Daerah	320 Layanan	688.000.000	100 Layanan	22.071.000	40 Layanan	9.688.000	8 Layanan	1.650.000	8 Layanan	2.968.400	6 Layanan	4.618.400	108 Layanan	26.686.400	108 Layanan	33,75%	3,81%	
		Pemeliharaan dan Verifikasi Data Perpajakan Pajak Daerah	Jumlah Data Perpajakan Pajak Daerah yang Telah Melalui Penilaian dan Verifikasi	48 Dokumen	2.300.700.000	16 Dokumen	155.192.000	8 Dokumen	338.986.000	1 Dokumen	85.100.000	3 Dokumen	82.650.600	4 Dokumen	162.750.000	20 Dokumen	322.942.000	20 Dokumen	41,67%	14,02%	
		Penerapan Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Penetapan Pajak Daerah	55 Dokumen	4.700.000.000	20 Dokumen	573.754.100	10 Dokumen	430.684.000	3 Dokumen	68.185.000	3 Dokumen	61.818.200	6 Dokumen	131.003.200	26 Dokumen	704.757.300	26 Dokumen	47,27%	14,68%	
		Penyediaan Ketersediaan Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Ketersediaan Pajak Daerah	160 Dokumen	740.000.000	49 Dokumen	22.111.000	20 Dokumen	9.008.000	0 Dokumen	1.650.900	0 Dokumen	2.551.000	0 Dokumen	4.261.000	49 Dokumen	26.312.900	49 Dokumen	30,63%	3,56%	

Evaluasi pelaksanaan Renja Perangkat Daerah sampai dengan Triwulan II ditujukan untuk mengidentifikasi sejauh mana kemampuan Perangkat Daerah dalam melaksanakan program dan kegiatan, mengidentifikasi realisasi pencapaian target kinerja program dan kegiatan renstra perangkat daerah, serta hambatan dan permasalahan yang dihadapi, selanjutnya kedepan perencanaan dan penganggaran yang perlu diambil untuk mengatasi faktor-faktor penyebab tersebut akan disesuaikan dengan kebutuhan dan prioritas.

2.3. Isu – Isu Penting Penyelenggaraan Tugas Dan Fungsi SKPD

Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat mempunyai tugas membantu Bupati dalam melaksanakan fungsi penunjang urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah di bidang pendapatan. Dalam upaya mewujudkan visi, misi, tujuan, dan sasaran sangat dipengaruhi oleh faktor lingkungan internal maupun eksternal yang menjadi tantangan dan peluang dalam meningkatkan pelayanan Perangkat Daerah, sebagai berikut :

Kekuatan yang dimiliki oleh Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat dalam mengelola Pendapatan Daerah antara lain :

1. Adanya Peraturan Bupati Tanjung Jabung Barat Nomor 29 Tahun 2018 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Badan Pendapatan Daerah.
2. Tersedianya anggaran yang memadai dalam menggerakkan aktivitas Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat.

Adapun Kelemahan yang dimiliki oleh Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat antara lain :

1. Sumber daya manusia yang belum memadai khususnya dalam hal pendapatan daerah
2. Sarana dan Prasarana terbatas, berdampak kepada Kualitas dan Kuantitas Aparatur.
3. Peraturan Perundang – Undangan tentang Pajak/ Retribusi Daerah.

Peluang yang dimiliki oleh Badan Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat adalah :

1. Adanya kebijakan otonomi daerah
2. Letak Geografis yang strategis dengan potensi pendapatan daerah yang belum dikelola secara optimal.
3. Adanya sistem dan prosedur serta pelimpahan wewenang sebagai dasar dan acuan mengelola keuangan daerah.

Beberapa permasalahan yang masih menjadi tantangan (ancaman) dalam Pengelolaan Pendapatan Daerah antara lain :

1. Ketersediaan potensi sumber daya alam belum sepenuhnya dikelola dan bergantung kepada harga pasaran antaran *Supply* dan *Demand*, seperti halnya harga pasar dunia untuk harga Walet yang tidak stabil.
2. Sistem pengelolaan keuangan di organisasi instansi pemerintah daerah belum sepenuhnya mampu dilaksanakan.
3. Masih rendahnya kesadaran Wajib Pajak untuk memenuhi kewajibannya membayar pajak.

Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi Badan Pendapatan Daerah didukung dengan regulasi peraturan daerah, anggaran yang memadai yang ditunjang ketersediaan personil dan mobilitas operasional yang memadai untuk lebih mengoptimalkan pengelolaan pendapatan daerah secara transparan. Peluang / potensi yang ada masih dapat untuk diberdayakan, didukung dengan aparatur dan Sistem Informasi Pengelolaan Pendapatan Daerah.

BAB III

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Rencana Kerja Perangkat Daerah adalah dokumen rencana Perangkat Daerah yang memuat program dan kegiatan yang diperlukan untuk mencapai sasaran pembangunan. Kerangka Pendanaan adalah analisis pengelolaan keuangan Daerah untuk menentukan sumber-sumber dana yang digunakan dalam pembangunan, optimalisasi penggunaan sumber dana dan peningkatan kualitas belanja dalam membiayai penyelenggaraan pemerintahan Daerah dalam upaya mencapai visi dan misi Kepala Daerah serta target pembangunan nasional.

Program adalah rangkaian kegiatan yang disusun secara sistematis berdasarkan isu-isu strategis sesuai tugas pokok dan fungsi Perangkat Daerah yang dilaksanakan secara bertahap dan berkesinambungan, penyusunan program pembangunan Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat akan terus berlanjut diprioritaskan sesuai Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Tanjung Jabung Barat. Program, kegiatan dan Sub Kegiatan yang akan dilaksanakan pada Perubahan Rencana Kerja Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat sebagai berikut :

No	Program dan Kegiatan	Sumber Dana
1	2	3
KEUANGAN		
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA		
Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, Dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		
1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	APBD
2	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	APBD
Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		
3	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	APBD
4	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	APBD
5	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD	APBD

No	Program dan Kegiatan	Sumber Dana
1	2	3
Kegiatan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah		
6	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	APBD
Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah		
7	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	APBD
8	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	APBD
Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah		
9	Penyediaan Komponen Instalasi/ Penerangan Bangunan Kantor	APBD
10	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	APBD
11	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	APBD
12	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	APBD
13	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	APBD
14	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	APBD
Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		
15	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	APBD
16	Pengadaan Mebel	APBD
17	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	APBD
Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		
18	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	APBD
19	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	APBD
20	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	APBD
Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		
21	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	APBD
22	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	APBD
23	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	APBD
24	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	APBD
PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH		
Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah		
25	Perencanaan Pengelolaan Pajak Daerah	APBD
26	Analisa dan Pengembangan Pajak Daerah, serta Penyusunan Kebijakan Pajak Daerah	APBD
27	Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah	APBD

No	Program dan Kegiatan	Sumber Dana
1	2	3
28	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak Daerah	APBD
29	Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah	APBD
30	Pengolahan, Pemeliharaan dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah	APBD
31	Penilaian Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB P2) serta Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)	APBD
32	Penetapan Wajib Pajak Daerah	APBD
33	Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah	APBD
34	Penelitian dan Verifikasi Data Pelaporan Pajak Daerah	APBD
35	Penagihan Pajak Daerah	APBD
36	Penyelesaian Keberatan Pajak Daerah	APBD
37	Pengendalian, Pemeriksaan dan Pengawasan Pajak Daerah	APBD
38	Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Retribusi Daerah	APBD

TABEL 3.1
RUNJUAN RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN BADAN PENDAPATAN DAERAH TAHUN 2023
KABUPATEN TANJUNGPINANG BARAT

No	Kode Kegiatan	Uraian Bidang Uraian Perencanaan Daerah dan Program/Kegiatan	REPLA 2023				DPA 2023			REPLA PERUBAHAN 2023			Sumber Dana
			Indikator Kinerja Program / Kegiatan	TARGET Capaian Kinerja Tahun 2023	Kebijakan Dasar Pagu Indikator	Subsidi Perubahan	Lokasi	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	TARGET Capaian Kinerja Tahun 2023	Salah Perubahan	Swasembada Bekerja		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
5.02		KELUANGAN			20,195,250,000	10,913,615,646				13,357,195,424	2,445,074,778		
5.02.01		PROGRAM PENGUJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA		100%	14,120,000,000	8,944,383,774				10,825,462,762	1,861,108,068		
5.02.01.2.01		Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Pemertasaan Penyediaan Komponen Penunjang Pelayanan Kantor	9 Dokumen	250,000,000	100,728,900				80,728,900	(10,600,000)		
5.02.01.2.01.01		Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	8 Dokumen	100,000,000	78,628,900		BAPELDA Kab. Tanjung Barat		8 Dokumen	(10,000,000)	APBD	
5.02.01.2.01.06		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	12 Laporan	150,000,000	30,000,000		BAPELDA Kab. Tanjung Barat		12 Laporan	30,000,000	APBD	
5.02.01.2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Keuangan Perangkat Daerah	1 Dokumen	8,650,000,000	7,347,008,774				1 Dokumen	7,327,802,912		
5.02.01.2.02.01		Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	55 Orang/Bulan	6,000,000,000	6,849,285,774		BAPELDA Kab. Tanjung Barat		55 Orang/Bulan	7,152,054,912	APBD	
5.02.01.2.02.02		Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyelidikan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	1 Dokumen	425,000,000	330,520,000		BAPELDA Kab. Tanjung Barat		1 Dokumen	348,620,000	APBD	
5.02.01.2.02.04		Koordinasi dan Pelaksanaan Aktifitas SKPD	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Aktifitas SKPD		50,000,000			BAPELDA Kab. Tanjung Barat				APBD	
5.02.01.2.02.07		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	12 Laporan	175,000,000	27,195,000		BAPELDA Kab. Tanjung Barat		12 Laporan	27,198,000	APBD	
5.02.01.2.03		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	12 Laporan	75,000,000	44,150,000				12 Laporan	50,150,000	6,000,000	
5.02.01.2.03.05		Penyusunan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Pendaftaran Barang Milik Daerah pada SKPD	12 Laporan	75,000,000	44,150,000		BAPELDA Kab. Tanjung Barat		12 Laporan	50,150,000	6,000,000	APBD
5.02.01.2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Kepegawaian Perangkat Daerah	1 Dokumen	305,000,000	87,400,000				1 Dokumen	134,550,000	47,150,000	
5.02.01.2.05.02		Penyediaan Pelakan Dinas beserta Abstrak Kelengkapannya	Jumlah Paket Pelakan Dinas beserta Abstrak Kelengkapannya	2 Paket	150,000,000	82,400,000		BAPELDA Kab. Tanjung Barat		2 Paket	125,550,000	47,150,000	APBD
5.02.01.2.05.09		Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan		75,000,000			BAPELDA Kab. Tanjung Barat				APBD	

No	Kode Kegiatan	Uraian/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	REVENU 2023			DPA 2023			Lokasi	REVENU PERUBAHAN 2023			Sumber Dana
			Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Target Capaian Kinerja Tahun 2023	Kebutuhan Dana Pagu Indikatif	Sebelum Perubahan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Target Capaian Kinerja Tahun 2023		Sesudah Perubahan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Target Capaian Kinerja Tahun 2023	
5.02.01.2.05.11		Bidang Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	8 Orang	65.000.000	6.000.000	BAPEMDA Kab. Tanjung Barat	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	8 Orang	5.000.000		AFBD	
5.02.01.2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Penyediaan Urusan Perangkat Daerah	12 Laporan	1.475.000.000	544.444.000	BAPEMDA Kab. Tanjung Barat	Jumlah Laporan Penyediaan Urusan Perangkat Daerah	12 Laporan	1.018.450.450	474.000.450	AFBD	
5.02.01.2.06.01		Penyediaan Komponen Instalasi/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	1 Paket	75.000.000	7.235.000	BAPEMDA Kab. Tanjung Barat	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	1 Paket	28.004.000	20.771.000	AFBD	
5.02.01.2.06.02		Penyediaan Peralatan dan Peningkatan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Peningkatan Kantor yang Disediakan	6 Paket	380.000.000	182.184.000	BAPEMDA Kab. Tanjung Barat	Jumlah Paket Peralatan dan Peningkatan Kantor yang Disediakan	6 Paket	322.630.000	180.446.000	AFBD	
5.02.01.2.06.04		Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	2 Paket	40.000.000	26.000.000	BAPEMDA Kab. Tanjung Barat	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	2 Paket	33.750.000	8.750.000	AFBD	
5.02.01.2.06.05		Penyediaan Barang Cetak dan Penggantian Pengadaan Barang Cetak dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggantian yang Disediakan	3 Paket	200.000.000	43.131.800	BAPEMDA Kab. Tanjung Barat	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggantian yang Disediakan	3 Paket	104.341.800	61.210.000	AFBD	
5.02.01.2.06.08		Penyediaan Bahan Baku dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Dokumen Bahan Baku dan Peraturan Perundang-Undangan	12 Dokumen	10.000.000	7.620.000	BAPEMDA Kab. Tanjung Barat	Jumlah Dokumen Bahan Baku dan Peraturan Perundang-Undangan	12 Dokumen	9.720.000	1.800.000	AFBD	
5.02.01.2.06.09		Penyenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	800.000.000	258.975.200	BAPEMDA Kab. Tanjung Barat	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	520.004.650	221.029.450	AFBD	
5.02.01.2.87		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Laporan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100%	2.060.000.000	6.800.000		Jumlah Laporan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100%	682.482.500	675.682.500		
5.02.01.2.07.01		Pengadaan Kendaraan Perenginan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Unit Kendaraan Perenginan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan		500.000.000		BAPEMDA Kab. Tanjung Barat	Jumlah Unit Kendaraan Perenginan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan				AFBD	
5.02.01.2.07.02		Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Laporan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Laporan yang Disediakan	5 Unit	880.000.000		BAPEMDA Kab. Tanjung Barat	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Laporan yang Disediakan	5 Unit	395.632.000	386.832.000	AFBD	
5.02.01.2.07.05		Pengadaan Mebel	Jumlah Mebel yang Disediakan	20 Unit	190.000.000	6.600.000	BAPEMDA Kab. Tanjung Barat	Jumlah Mebel yang Disediakan	20 Unit	76.600.000	69.800.000	AFBD	
5.02.01.2.07.08		Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	20 Unit	460.000.000		BAPEMDA Kab. Tanjung Barat	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	20 Unit	448.250.650	449.250.650	AFBD	
5.02.01.2.07.07		Pengadaan Aset Tetap Lainnya	Jumlah Unit Aset Tetap Lainnya yang Disediakan		100.000.000		BAPEMDA Kab. Tanjung Barat	Jumlah Unit Aset Tetap Lainnya yang Disediakan				AFBD	
5.02.01.2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	12 Laporan	490.000.000	270.285.000		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	12 Laporan	336.311.000	66.028.000		
5.02.01.2.08.01		Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 Laporan	15.000.000	3.250.000	BAPEMDA Kab. Tanjung Barat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 Laporan	7.800.000	4.550.000	AFBD	
5.02.01.2.08.02		Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	300.000.000	197.000.000	BAPEMDA Kab. Tanjung Barat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	247.000.000	60.000.000	AFBD	

No	Kode Kegiatan	Uraian/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	RENJA 2023			GPA 2023			RENJA PERUBAHAN 2023			Sumber Dana
			Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Target Capaian Kinerja Tahun 2023	Kebijakan Dana Page Indikatif	Salutem Perubahan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Target Capaian Kinerja Tahun 2023	Sesuai Perubahan			
5.02.01.2.05.04		Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Diadatkan	Jumlah Laporan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Diadatkan	12 Laporan	85.000.000	70.005.000	BAPELDA Kab. Tanjung Barat	Jumlah Laporan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Diadatkan	12 Laporan	81.481.000	11.476.000	APBD
5.02.01.2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Laporan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100%	905.000.000	505.356.100		Jumlah Laporan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100%	785.985.950	250.417.850	
5.02.01.2.09.01		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan dan dibayarkan Pajaknya	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	1 Unit	100.000.000	79.740.900	BAPELDA Kab. Tanjung Barat	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	1 Unit	87.740.900	8.000.000	APBD
5.02.01.2.09.02		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinasnya	45 Unit	300.000.000	283.657.200	BAPELDA Kab. Tanjung Barat	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinasnya	45 Unit	283.657.200		APBD
5.02.01.2.09.05		Pemeliharaan Mebel	Jumlah Mebel yang dipelihara		6.000.000		BAPELDA Kab. Tanjung Barat	Jumlah Mebel yang dipelihara				APBD
5.02.01.2.09.09		Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	100 Unit	300.000.000	83.980.000	BAPELDA Kab. Tanjung Barat	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	100 Unit	262.980.000	169.870.000	APBD
5.02.01.2.09.09		Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Rehabilitasi	3 Unit	200.000.000	79.550.000	BAPELDA Kab. Tanjung Barat	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Rehabilitasi	3 Unit	151.627.850	72.077.850	APBD
5.02.04		PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH	Persentase Pendapatan Asli Daerah terhadap Pendapatan Daerah	8,12%	6.075.256.000	1.901.261.872		Persentase Pendapatan Asli Daerah terhadap Pendapatan Daerah	8,12%	2.531.727.962	582.465.790	
5.02.04.2.01		Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah	Jumlah Pendapatan Asli Daerah	101.640.900,000	6.075.256.000	1.901.261.872		Jumlah Pendapatan Asli Daerah	101.640.900,000	2.531.727.962	582.465.790	
5.02.04.2.01.01		Pencapaian Penghasilan Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Rencana Penghasilan Pajak Daerah	2 Dokumen	262.500.000	95.198.000	BAPELDA Kab. Tanjung Barat	Jumlah Dokumen Rencana Penghasilan Pajak Daerah	2 Dokumen	87.356.000	1.200.000	APBD
5.02.04.2.01.02		Analisis dan Pengembangan Pajak Daerah serta Penyusunan Kebijakan Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Analisis Pajak Daerah serta Pengembangan Pajak Daerah dan Kebijakan Pajak Daerah	3 Dokumen	250.000.000	12.225.000	BAPELDA Kab. Tanjung Barat	Jumlah Dokumen Hasil Analisis Pajak Daerah serta Pengembangan Pajak Daerah dan Kebijakan Pajak Daerah	3 Dokumen	12.225.000		APBD
5.02.04.2.01.03		Penyuluhan dan Sosialisasi Kebijakan Pajak Daerah	Jumlah Laporan Pelaksanaan Penyuluhan dan Sosialisasi Kebijakan Pajak Daerah	10 Laporan	417.000.000	36.685.000	BAPELDA Kab. Tanjung Barat	Jumlah Laporan Pelaksanaan Penyuluhan dan Sosialisasi Kebijakan Pajak Daerah	10 Laporan	108.955.000	69.500.000	APBD
5.02.04.2.01.04		Penyediaan Sarana dan Prasarana Penghasilan Pajak Daerah	Jumlah Sarana dan Prasarana Penghasilan Pajak Daerah	1 Unit	450.000.000	36.210.000	BAPELDA Kab. Tanjung Barat	Jumlah Sarana dan Prasarana Penghasilan Pajak Daerah	1 Unit	134.926.850	98.719.850	APBD
5.02.04.2.01.06		Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah, Subjek Pajak dan Wajib Pajak Daerah	11 Laporan	418.000.000	192.101.000	BAPELDA Kab. Tanjung Barat	Jumlah Laporan Hasil Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah, Subjek Pajak dan Wajib Pajak Daerah	11 Laporan	244.821.000	62.720.000	APBD

No	Kode Kegiatan	Uraian/Bidang Usahan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	REKUA 2023			DPA 2023			Lokasi	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Target Capaian Kinerja Tahun 2023	Sesudah Perubahan	Sumber Dana
			Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Target Capaian Kinerja Tahun 2023	Kekesulitan Dasar Pagi Indikator	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan						
	5.02.04.2.01.06	Pengalihan, Pemeliharaan dan Pelebaran Basis Data Pajak Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengalihan, Pemeliharaan dan Pelebaran Basis Data Pajak Daerah	4 Laporan	680.000.000	173.750.000	BAPENDA Kab. Tanjung Barat	Jumlah Laporan Hasil Pengalihan, Pemeliharaan dan Pelebaran Basis Data Pajak Daerah	4 Laporan	208.750.000	35.000.000	APBD	
	5.02.04.2.01.07	Penilaian Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB P2) serta Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)	Jumlah Objek Pajak yang Diastutikan NUP nya	2500 Objek Pajak	710.000.000	70.935.000	BAPENDA Kab. Tanjung Barat	Jumlah Objek Pajak yang Diastutikan NUP nya	2500 Objek Pajak	70.935.000	-	APBD	
	5.02.04.2.01.08	Persiapan Wajib Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Kelengkapan Pajak Daerah	3 Dokumen	244.864.872	9.686.000	BAPENDA Kab. Tanjung Barat	Jumlah Dokumen Kelengkapan Pajak Daerah	3 Dokumen	252.620.812	47.685.940	APBD	
	5.02.04.2.01.09	Revisi dan Konsultasi Pajak Daerah	Jumlah Layanan dan Konsultasi Pajak Daerah	40 Layanan	160.000.000	9.686.000	BAPENDA Kab. Tanjung Barat	Jumlah Layanan dan Konsultasi Pajak Daerah	40 Layanan	9.686.000	-	APBD	
	5.02.04.2.01.10	Pemastian dan Verifikasi Data Pelaporan Pajak Daerah	Jumlah Data Pelaporan Pajak Daerah yang Telah Dilakukan Penastian dan Verifikasi	8 Dokumen	440.000.000	338.985.000	BAPENDA Kab. Tanjung Barat	Jumlah Data Pelaporan Pajak Daerah yang Telah Dilakukan Penastian dan Verifikasi	8 Dokumen	338.985.000	-	APBD	
	5.02.04.2.01.11	Pengalihan Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Pengalihan Pajak Daerah	10 Dokumen	950.000.000	430.884.000	BAPENDA Kab. Tanjung Barat	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Pengalihan Pajak Daerah	10 Dokumen	679.344.000	248.680.000	APBD	
	5.02.04.2.01.12	Penyediaan Kebutuhan Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Penyelastian Kebutuhan Pajak Daerah	20 Dokumen	125.000.000	9.088.000	BAPENDA Kab. Tanjung Barat	Jumlah Dokumen Hasil Penyelastian Kebutuhan Pajak Daerah	20 Dokumen	9.088.000	-	APBD	
	5.02.04.2.01.13	Pengendalian, Pemertastian dan Pengawasan Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Pemertastian serta Pengendalian dan Pengawasan Pajak Daerah	11 Dokumen	300.000.000	208.513.000	BAPENDA Kab. Tanjung Barat	Jumlah Dokumen Hasil Pemertastian serta Pengendalian dan Pengawasan Pajak Daerah	11 Dokumen	208.513.000	-	APBD	
	5.02.04.2.01.14	Pembinaan dan Pengawasan Pergesahan Retribusi Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan dan Pengawasan Pergesahan Retribusi Daerah	16 Laporan	225.750.000	124.265.000	BAPENDA Kab. Tanjung Barat	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan dan Pengawasan Pergesahan Retribusi Daerah	16 Laporan	125.486.000	1.200.000	APBD	
J U M L A H													
											10.915.613.646	13.357.190.444	2.443.574.778

BAB IV PENUTUP

Penyusunan Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah berpedoman pada Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) dan hasil pengendalian pelaksanaan Renja Perangkat Daerah sampai dengan Triwulan II Tahun berkenaan. Hal ini dilaksanakan untuk meningkatkan kinerja yang lebih efektif, efisien dan optimal dalam mencapai sasaran yang telah ditetapkan.

Perubahan Rencana Kerja ini akan dijadikan sebagai pedoman/acuan dalam melaksanakan tugas dan fungsi Badan Pendapatan Daerah serta sebagai acuan dalam menyusun program/kegiatan Tahun 2023. Keberhasilan pelaksanaan Perubahan Rencana Kerja ini tidak terlepas dari peran dan tanggung jawab seluruh jajaran Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat serta peran aktif semua pihak yang terkait.

Kuala Tungkal, 9/11

KEPALA BAPENDA,

